

LAKIP



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. BOALEMO



TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut berupa ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Peran semua pihak di jajaran BPKPD dalam menciptakan *akuntabilitas* dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Merupakan persembahan kebersamaan nan bernuansa indah yang tak bias diabaikan, sehingga kinerja tahun 2025 dapat terekam dan terpotret dalam lembar demi lembar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada bentuk kebijaksanaan, Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategi.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dimasa yang akan datang.

Tilamuta, Januari 2026

**KEPALA BPKPD
KABUPATEN BOALEMO**

Drs. MOHAMMAD TAUEIK KUMALI, MM
NIP. 196911141990101001





IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2023 telah mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang tertuang dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Perubahan yang terjadi hanya merubah Nomenklatur Organisasi yang sebelumnya dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah digantikan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo, namun tidak merubah target indicator kinerja sasaran SKPD dengan capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo secara ringkas dapat digambarkan pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Indeks Opini BPK-RI atas LKPD	Skor Hasil Pengukuran Indeks Dimensi Opini BPK x Bobot Nilai (15)	15	15	Opini BPK atas LKPD Kab.Boalemo 2025 Predikat WTP
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Predikat Sakip	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	N/A	Proses Reviu APIP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo memiliki 2 (dua) Indikator Sasaran yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian rencana kinerja tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



Kabupaten Boalemo dengan tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dalam menyampaikan Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (IPKD) dengan hasil Capaian pengukuran sebagai berikut :

- Tahun 2021 Total Indeks 64,423 (Predikat B) Terbaik 3 Se-Provinsi Gorontalo
- Tahun 2022 Total Indeks 75,213 (Predikat B) Terbaik 2 Se-Provinsi Gorontalo
- Tahun 2023 Total Indeks 79,423 (Predikat B) Terbaik 1 Se-Provinsi Gorontalo

jika dilihat dari laporan 2021 s/d 2023 Pemkab Boalemo mengalami peningkatan dalam Pelaporan Indeks Pengelolaan Keuangan.



DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Isu Strategis	7
1.4 Sistematika LAKIP.....	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis.....	9
2.2 Perjanjian Kinerja.....	10
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.2 Realisasi Anggaran.....	31
BAB IV. PENUTUP	34



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengeahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kab. Boalemo dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 merupakan wujud Pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan Misi Pembangunan serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Periode 2023 – 2026.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.



1.2.1 Susunan Organisasi

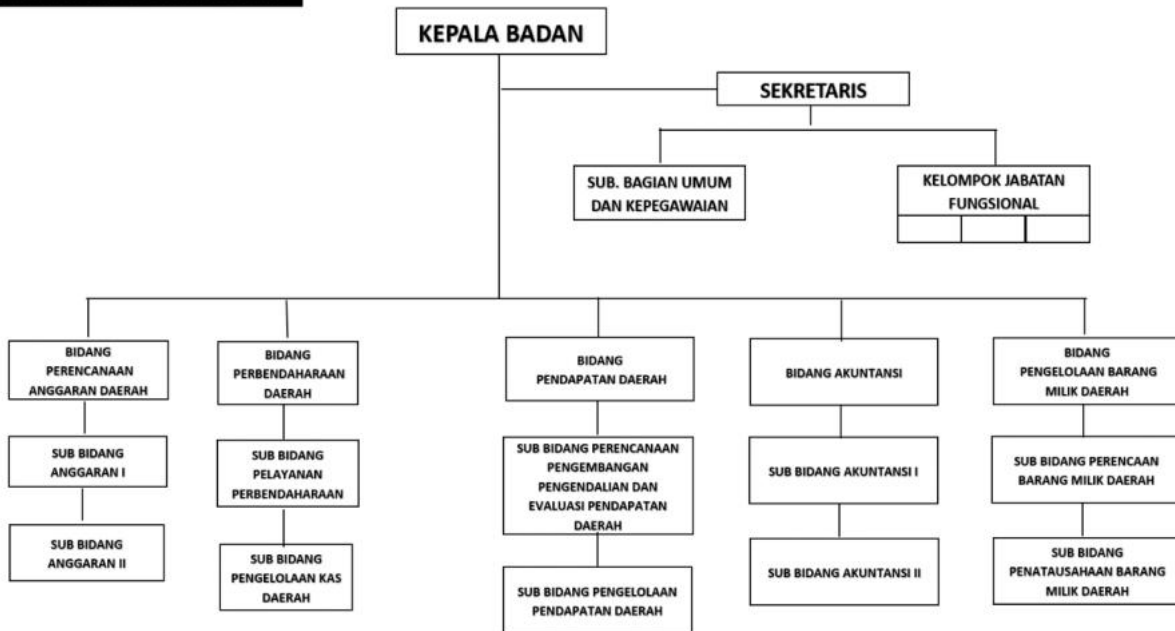
Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Boalemo No. 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo. Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat Badan, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2). Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Perencanaan Anggaran membawahi :
 - 1). Sub Bidang Anggaran I;
 - 2). Sub Bidang Anggaran II,
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pelayanan Perbendaharaan;
 - e. 2). Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah,
- f. Bidang Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah;
 - 2). Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah,
- g. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Perencanaan Barang Milik Daerah;
 - 2). Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah,
- h. Bidang Akuntansi, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Akuntansi I
 - 2). Sub Bidang Akuntansi II



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPKPD Kab. Boalemo

LAMPIRAN PERBUP NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO



1.2.2 Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo

Untuk menyelenggarakan tugasnya BPKPD mempunyai Fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah;
- b. Pelaksanan Kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjukan urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah;

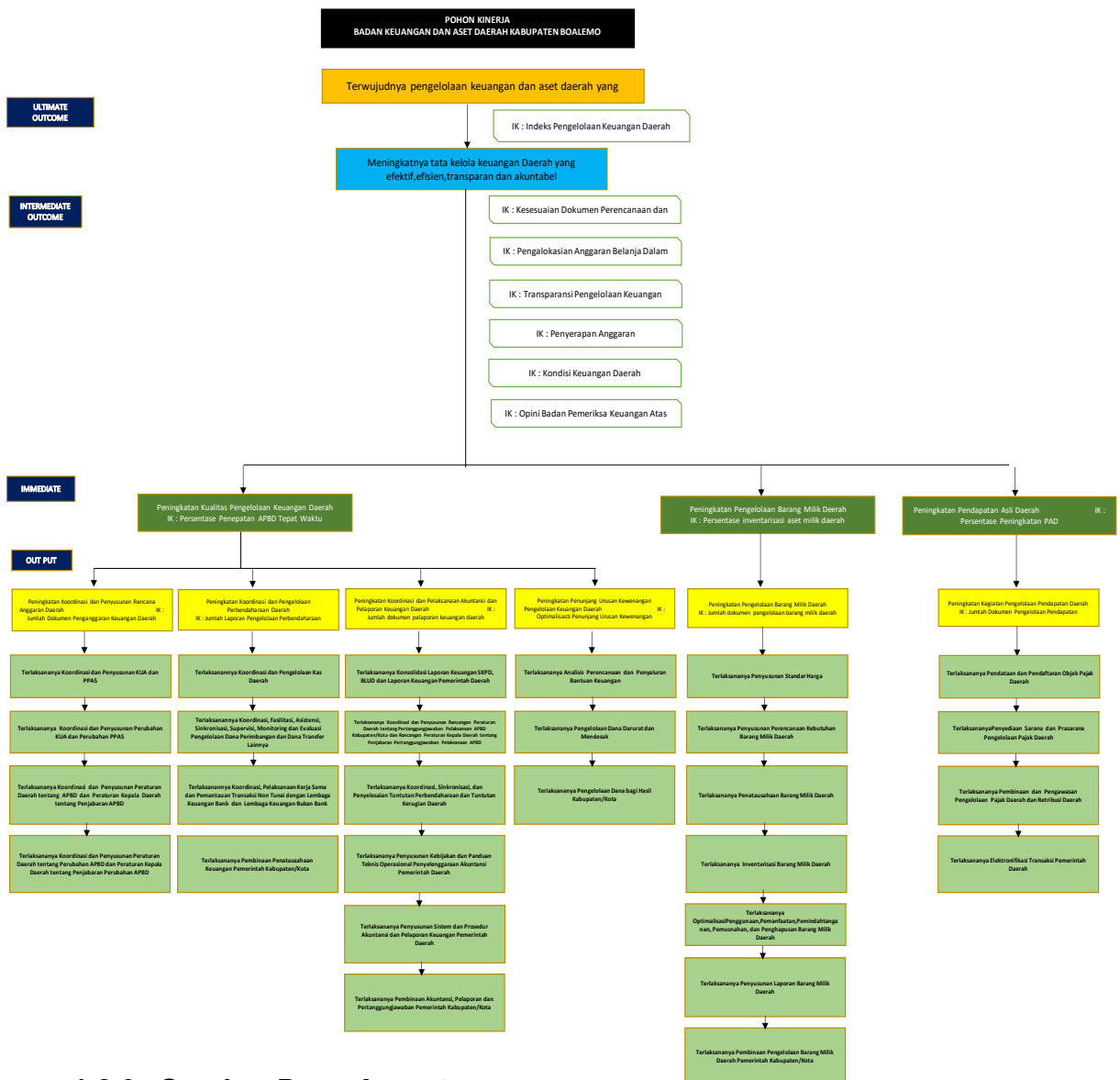


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo mengacu pada peta proses bisnis yang dituangkan dalam pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.3 Pohon Kinerja



1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan



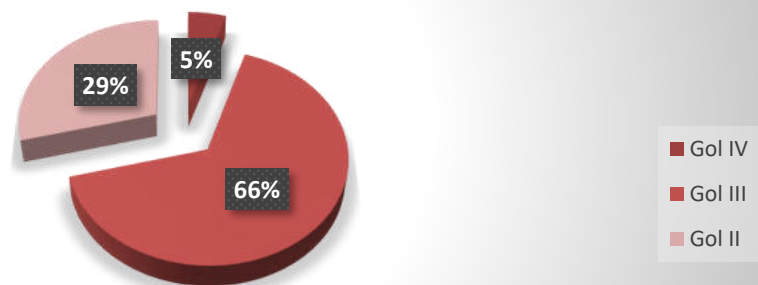
melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo didukung oleh sumber daya manusia yaitu sebanyak 63 (Enam Puluh Tiga) orang dengan tingkat pendidikan terdiri dari Strata 2 (S2) , Strata 1 (S1), Sarjana Muda / DI, DII, D III, SLTA dan SLTP

JUMLAH PEGAWAI BPKPD BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN

NO	GOLONGAN	BIDANG						Jumlah
		KABAN	SEKRETARIS	PENDAPATAN	ANGGARAN	AKUNTANSI	ASET	
1	IV	1	1	-	-	1	-	3
2	III	-	6	11	13	3	8	41
3	II	-	6	5	4	2	1	18
4	I	-	-	-	1	-	-	-
JUMLAH		1	13	21	17	6	9	63

Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Golongan



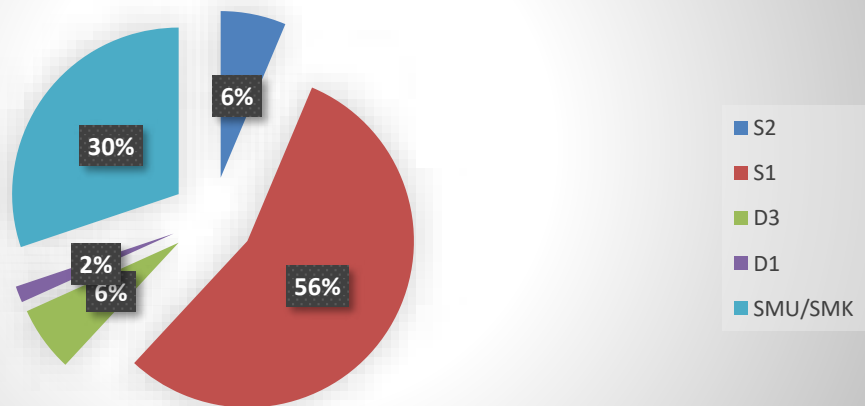
JUMLAH PEGAWAI BPKPD



BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BIDANG						JUMLAH
		KABAN	SEKRETARIS	PENDAPATAN	ANGGARAN	AKUNTANSI	ASET	
1	S2	1	1	1	-	-	1	4
2	S1	-	6	8	11	3	7	35
3	D3	-	-	1	3	-	-	4
4	D1	-	1	-	-	-	-	1
5	SMU/SMK/MA	-	6	6	4	2	1	19
JUMLAH		1	13	16	18	5	9	63

Persentase Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan





1.2.4 SARANA PRASARANA

Perlengkapan atau sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) antara lain bangunan fisik berupa Kantor yang berlokasi di jalan Merdeka Desa Limbato Kompleks Perkantoran Bupati Boalemo (berlantai dua) dengan luas tanah 990 m² dan luas bangunan 1042 m².

Selain itu untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas kedinasan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki aset peralatan dan mesin serta perlengkapan kantor lainnya.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo.

Adapun Permasalahan dan isu strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah Kabupaten Boalemo pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PERMASALAHAN	ISU STRATEGIS
1. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran	1. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian anggaran.
2. Pengendalian belanja daerah belum berjalan sesuai tatakala	2. Perlunya peningkatan pengendalian belanja daerah
3. Perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset belum optimal.	3. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah
4. Pelayanan, pendaftaran, dan penetapan pajak daerah kurang optimal	4. Perlunya peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan



dan pendapatan daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

1) Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.

2) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi antara lain Struktur Organisasi , Isu Strategis dan Sistematika LAKIP.

3) BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan Rencana Kerja Tahun 2025.

4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2025 dan realisasi anggaran Tahun 2025 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

5) BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Tahun 2023 – 2026 maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan indikator dan target sesuai dengan yang telah tertuang dalam matriks Renstra. Setiap sasaran yang telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan terukur.

Dalam garis besar Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo secara implisit didalamnya terjabarkan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan yang cukup realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Tujuan ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Dengan diformulasikan tujuan strategis ini, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo yaitu:

- Meningkatkan Kualitas Tata Kelola BPKPD Kabupaten Boalemo
- Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

2) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan



memantau pencapaian kinerja. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan tujuannya juga telah dicapai.

Sasaran merupakan suatu kondisi Ideal yang kehendak dicapai dalam rangka Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut yaitu Mempertahankan ketertiban administrasi pengelolaan Daerah.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun perjanjian kinerja yang merupakan kesepakatan untuk mewujudkan suatu kinerja pada tahun 2025, sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja antara Bupati dengan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (Eselon II), berisikan Pernyataan untuk mewujudkan kinerja utama dengan menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampikan indikator lain yang relevan.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
BPKPD Kabupaten Boalemo**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta Pelayanan Publik	Nilai SAKIP OPD	BB
2		Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100%
3		Jumlah Penerimaan PAD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	80%
4		Persentase ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan BPKPD Kab.Boalemo	35%
5	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6,6
		Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,9
		Penyerapan Anggaran	20
		Kondisi Keuangan Daerah	5,4
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 23.502.276.533,22.-	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 121.650.508.098,00.-	
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 467.619.589,00.-	
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.419.659.460,00.-	
JUMLAH		Rp. 147.040.063.880,00.-	

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah, sebagai dasar penilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

2.3 Rencana Kerja Tahun 2025

Dengan ditetapkannya tujuan, strategis dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program – program yang akan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai aksi dalam pemenuhan progres organisasi.



Adapun anggaran belanja BPKPD tersaji pada tabel berikut ini :

Proporsi Anggaran Belanja BPKPD pada APBD Tahun 2025

Uraian Belanja	Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp27.031.188.661,22.-	18,38%
Belanja Modal	Rp416.806.000,00.-	41,68%
Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.000.000.000,00.-	0,68%
Belanja Transfer	Rp118.592.069.219,00.-	80,65%
Jumlah	Rp147.040.063.880,22.-	100%

Proporsi Anggaran Belanja BPKPD Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp23.502.276.553,22
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp301.768.190,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp47.775.190,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp170.568.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp83.425.000,00
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp19.348.242.163,22
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp19.238.515.038,22
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp109.727.125,00
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp51.050.000,00
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rp51.050.000,00
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp265.900.000,00
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp265.900.000,00
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp409.806.000,00
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp409.806.000,00
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp3.004.677.700,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp238.685.892,00
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp2.765.991.808,00



G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp120.832.500,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp94.512.500,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp26.320.000,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp121.650.508.098,00
A	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp1.224.079.310,00
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp32.258.765,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp158.658.905,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp360.043.485,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp249.984.155,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp353.384.000,00
6	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp69.750.000,00
B	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp429.956.370,00
1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp95.080.370,00
2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Rp81.900.000,00
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Rp74.000.000,00
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp56.536.000,00
5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp122.440.000,00
C	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp404.403.199,00
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp155.408.699,00



2	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Rp205.757.345,00
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Rp18.859.655,00
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp24.377.500,00
D	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp119.592.069.219,00
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp116.196.000.986,00
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp1.000.000.000,00
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp2.396.068.233,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp467.619.589,00
A	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp467.619.589,00
1	Penyusunan Standar Harga	Rp77.596.680,00
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp54.050.000,00
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp76.345.497,00
4	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Rp87.978.600,00
5	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Rp104.004.190,00
6	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp46.688.372,00
7	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp20.956.250,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp1.419.659.640,00
A	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp1.419.659.640,00
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp727.917.500,00
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp311.495.000,00
3	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp134.550.740,00
4	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp245.696.400,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi planning yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik dan bersih disertai penerapan e-Government	Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK RI Terhadap LKPD	N/A

(Renstra). Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan Pembangunan sifatnya terukur. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2026.

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian Indikator kinerja Tahun 2022 berdasarkan target Rencana Strategis Periode Tahun 2017 – 2022 dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mencapai Realisasi Opini BPK-RI dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 s/d 2022.



Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran	Indikator kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya tata kelola keuangan Daerah yang efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Indeks Opini BPK-RI atas LKPD	15	15	Opini BPK atas LKPD Kab.Boalemo 2025 Predikat WTP
Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan public	Predikat Sakip	B	N/A	Proses Reviu APIP

Dari table diatas, terdapat dua sasaran yang terbagi dalam dua indicator pada Tahun 2025 Yaitu Indeks Opini BPK-RI atas LKPD dengan Target 15 dan realisasi 15 sehingga mencapai target yang ditentukan dan untuk Predikat Sakip saat ini belum mendapatkan Predikat disebabkan masih dalam proses reviu APIP Inspektorat.



3.1.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo. dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

a). Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Penetapan Kinerja, Rencana Strategis BPKPD tahun 2025-2026 dan RPD tahun 2025-2026.

b). Indikator Kinerja Sasaran

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:



Tabel. 3.1.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih Dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.

3.1.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Strategi

Pada Tahun 2025 Badan Keuangan Kabupaten Boalemo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis (renstra) tercermin dalam capaian kinerja setiap indikator pada sasaran strategis sebagai berikut :

I. Sasaran: Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran 1 dilakukan dengan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran dengan sebagai berikut :



Tabel 3.1.2

Capaian Indikator Kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas kemandirian dalam pengelolaan keuangan Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025	Capaian Tahun Sebelumnya (2025)	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2025)
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabel	Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	6,6	-	-	11,456	-
	Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	-	-	19,828	-
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,9	-	-	14,483	-
	Penyerapan Anggaran	20	-	-	15	-
	Kondisi Keuangan Daerah	5,4	-	-	3,656	-
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	15	-	-	15	-



Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel dengan indikator berikut :

a. Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Skor Kesesuaian}}{\text{Jumlah Program}} \times 100\%$$

Dokumen penilaian terhadap Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran mempunyai beberapa komponen data pendukung terdiri dari :

- Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dengan RKPD
- Kesesuaian Nomenklatur Program RKPD dengan KUA-PPAS
- Kesesuaian Nomenklatur Program KUA-PPAD dengan APBD
- Kesesuaian Antara Pagu RKPD dengan KUA-PPAS
- Kesesuaian Antara Pagu KUA-PPAS dengan APBD

Hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.

b. Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dengan Formulasi Perhitungan

Skor Rata – Rata x Bobot

Pengukuran terhadap Pengalokasi Belanja dalam APBD terdiri dari beberapa Indikator yang merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (mandatory spending) yakni :

- ✓ Alokasi Jumlah Belanja untuk fungsi Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD



- ✓ Alokasi Jumlah Belanja untuk urusan Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD
- ✓ Alokasi jumlah belanja untuk infrastruktur yang langsung dalam alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transfer Umum
- ✓ Alokasi Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.

c. **Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Formulasi Perhitungan**

Skor Rata – Rata x Bobot

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup dari Ketepatan Waktu dan Keteraksesan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengukuran dan keteraksesan tersebut dilakukan terhadap beberapa dokumen yaitu :

No	Dokumen
1	Ringkasan Dokumen RKPD
2	Kebijakan Umum Anggaran
3	Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran
4	Ringkasan Dokumen RKA SKPD
5	Ringkasan Dokumen RKA PPKD
6	Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
7	Peraturan Daerah tentang APBD
8	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
9	Ringkasan DPA-SKPD
10	DPA PPKD
11	Realisasi Pendapatan Daerah



12	Realisasi Belanja Daerah
13	Realisasi Pembiayaan Daerah
14	Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD
15	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
16	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
17	Ringkasan RKA Perubahan APBD
18	Rencana Umum Pengadaan
19	SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
20	Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi
21	Laporan Arus Kas
22	Laporan Realisasi Anggaran Seluruh SKPD
23	Laporan Realisasi Anggaran PPKD
24	Neraca
25	Calk Pemerintah Daerah
26	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah
27	Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah
28	Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
29	Opini BPK RI

Hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.



d. Penyerapan Anggaran dengan Formulasi Perhitungan

Skor Rata – Rata x Bobot

Penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental yang fundamental dalam pengelolaan Keuangan Daerah. Penyerapan anggaran salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimulai dari perencanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan.

Penentuan Skor masing – masing indikator untuk penyerapan anggaran diukur dari beberapa data berikut :

- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bunga
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Hibah
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bantuan Sosial
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Barang dan Jasa
- Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Modal

Hasil pengurukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.

e. Kondisi Keuangan Daerah dengan Formulasi Perhitungan

Hasil Skor Rata – Rata Indeks Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan Keuangan suatu pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya (Kemandirian Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Layanan),



mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak Keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks Kondisi Keuangan Daerah dilihat dari 6 (enam) pembentuk kondisi Keuangan pemerintah Daerah, dengan sebagai berikut :

- Kemandirian Keuangan
- Fleksibilitas Keuangan
- Solvabilitas Operasional
- Solvabilitas Jangka pendek
- Solvabilitas Jangka Panjang
- Solvabilitas Layanan

Hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.

f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD dengan Formulasi Perhitungan

Skor Hasil Pengukuran Indeks Dimensi Opini BPK adalah skor x bobot

Pemberian Opini atas LKPD dilakukan oleh BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, system pengendalian internal, dan ketaatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil Opini BPK atas LKPD, maka dalam pengukuran skor opini BPK diperoleh dengan cara :

- Apabila Pemerintah Daerah memperoleh Opini WTP secara 3 Tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1
- Apabila pemerintah Daerah memperoleh opini WTP secara 2 Tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,667).



- Apabila pemerintah Daerah memperoleh opini WTP secara 1 tahun (dalam masa 3 tahun terakhir berturut-turut akan diberikan skor 1/3 (0,334)
- Apabila pemerintah Daerah memperoleh opini *disclaimer* diberikan skor 0.

Hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan (IPKD) Tahun 2025 belum ada karena Penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Berikutnya.

II.Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik.

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja melalui indikator kinerja sasaran dengan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025	Capaian Tahun Sebelumnya	Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2025)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	4	-	-	-	4
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan	0	0	0	0	0



Predikat Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	AA	Proses Evaluasi oleh inspektorat	-	BB	AA
Indeks Reformasi Birokrasi	75	Proses Penilaian	-	60	75
Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP	100	Proses Evaluasi	-	80	100

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran meningkatnya kualitas kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah dari Lima indikator yakni:

a. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Formulasi perhitungan

Hasil Survei Melalui Koesioner

.....

b. Indikator Presentase Penurunan Jumlah Temuan dengan Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Temuan Tahun } n - 1 \text{ dikurangi Jumlah Temuan Tahun } n}{\text{Jumlah Temuan Tahun } n - 1} \times 100\%$$

Penjelasan hasil capaian dari indikator tersebut diatas dihasilkan dari 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melaksanakan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Barang Milik



Daerah, dimulai dari proses tahapan pengelolaan BMD sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut :

- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- Pengadaan;
- Penggunaan;
- Pemanfaatan;
- Pengamanan dan pemeliharaan;
- Penilaian;
- Pemindahbukuan;
- Pemusnahan;
- Penghapusan;
- Penatausahaan;

c. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan Formulasi Perhitungan

Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

Penjelasan Hasil Capaian Indikator Kinerja ini belum dapat direalisasikan dikarenakan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 masih dalam proses pemeriksaan.

d. Indikator Indeks Reformasi Birokrasi dengan Formulasi Perhitungan

Hasil Penilaian Menpan RB

Penjelasan hasil Capaian Indikator kinerja ini dijelaskan dengan adanya perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sehingga Pelaksanaan pengisian PMPRB Tahun 2025 dihentikan sementara berdasarkan Surat Edaran



Menpan RB Nomor : B/01/RB/06/2025 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan perubahan penyampaian Dokumen Reformasi Birokrasi Badan Keuangan telah menindaklanjuti penyampaian Data/Dokumen Inovasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang pada saat ini masih dalam proses penilaian.

e. Indikator Presentase Persentase Tindak Lanjut Temuan Inspektorat/BPK/BPKP dengan Formulasi Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan yang ditindak lanjut}}{\text{Total Temuan Badan Keuangan dan Aset Daerah}} \times 100\%$$

Untuk Hasil Capaian kinerja ini masih dalam Proses Penilaian sehingga belum dapat diukur.

Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo pada Tahun 2025. Diperoleh pencapaian indikator Kinerja antara lain sebagaimana tersaji dalam table berikut :

Tabel 3.6.

Capaian Kinerja Berdasarkan Program Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo

Indikator Kinerja Program	Formulasi Indikator Program	Sumber Data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 dukumen -jumlah	(4:4) x 100%	100%



	dokumen penganggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	dokumen penganggaran : 4		
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik, dengan target : 45 jumlah seluruh OPD : 47	Perhitungan realisasi : (45:47) x 100%	95,74%
Persentase Ketercapaian Target Pendapatan Asli Daerah	Nilai Realisasi PAD / Target PAD x 100%	Target PAD Rp. 78.784.536.262 dan Nilai Realisasi PAD Rp. 70.788.958.477	$\frac{70.788.958.477,00}{78.784.536.262,00} \times 100\%$	89,85%



3.2. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2025, didukung dengan anggaran sebesar **Rp. 147.040.063.880,22,-** Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Boalemo.

Sasaran	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efektif, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	100%	Rp. 121.650.508.098,00	Rp 115.936.027.452,00
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Inventarisasi aset milik Daerah	100%	100%	Rp. 467.619.589,00	Rp. 412.352.812,00
	Program Pengelolaan Pendapatan	Persentasi Peningkatan PAD	100%	100%	Rp. 1.419.659.640,00	Rp. 1.324.519.051,00



Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja serta pelayanan publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran	100%	100%	Rp 23.502.276.553,22	Rp 21.932.078.561,00
--	---	---	------	------	----------------------	----------------------



3.2.1 INOVASI

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo melakukan beberapa inovasi terutama terkait dengan pelayanan terhadap wajib pajak, berupa Aplikasi BITUO (Boalemo Implementasi Transaksi Non Tunai)

Penjelasan alur Penggunaan Aplikasi "BITUO BPHTB" untuk Operator BPHTB :

1. Setelah ditemukan Kecamatan ataupun Desa , maka Tampilan Aplikasi BPHTB akan seperti ini
2. Selanjutnya Klik Input permohonan (lihat yang ada panah merah)

The screenshot shows the 'e-BPHTB by BITUO' dashboard. The main content area is titled 'Dashboard Control Panel' and 'PST - Detail Permohonan Pelayanan BPHTB'. There is a search bar and a table with columns: No, Detail Permohonan, Detail Wajib Pajak, Detail Objek Pajak, Status, Aksi, and Posting. A red arrow points to the 'Input Permohonan' button in the top right corner of the table area.

No	Detail Permohonan	Detail Wajib Pajak	Detail Objek Pajak	Status	Aksi	Posting
1	New Lihat History Layanan 0009/PST/BPHTB/I/2023 SUTRIYANTI BASRI DUNGGIO Tanggal 26 Jan 2023 [Jual - Beli - Hak Pertama]	7502040908820004 RINTO UMAR HUNGAYONAA - TILAMUTA 6282191917205	75.04.020.011.006.0186.0 YERLINA SIMALLI, S.PD HUNGAYONAA - TILAMUTA Luas Bumi : 276 M ² Luas Bngn : 0 M ²	Pengiriman Berkas Pengajuan BPHTB Bisa Verifikasi Belanja Pembayaran	Kirim Berkas	Kirim Berkas



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dengan tingkat keberhasilan mampu meningkatkan dalam pemenuhan Laporan Indeks Pengelolaan Keuangan (IPKD) dari kategori perlu perbaikan sampai mendapati kategori baik dengan meraih Kabupaten/kota terbaik 1 Se-Provinsi Gorontalo dalam Laporan IPKD pada Tahun 2023.
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 10 (Sepuluh).
3. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 100% dengan kategori baik.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Boalemo dilihat dari nilai capaian diatas sehingga termasuk kategori berhasil. Rencana Tindaklanjut dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam menentukan indikator sasaran dan program menggunakan metode penghitungan tertentu sehingga menghasilkan target yang akurat dan valid.
2. Melakukan reuiu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron.
3. Dalam meningkatkan kinerja perlu percepatan peningkatan kualitas kinerja



sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.

4. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada pengurus barang pengguna, pengelola keuangan SKPD dan pelaksana akuntansi SKPD.

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 akan dimanfaatkan oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai impan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan.

Tilamuta, Januari 2026
KEPALA BPKPD
KABUPATEN BOALEMO



Drs. MOHAMMAD TAUFIQ KUMALI, MM
NIP. 19691114 199010 1 001